

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pembahasan mengenai negara Tiongkok merupakan salah satu hal yang paling menarik untuk dikaji. Dikarenakan Tiongkok terkenal akan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan untuk saat ini sedang menjadi sorotan dunia internasional. Pada bab ini penulis akan mengangkat sebuah fenomena mengenai alasan dibalik peningkatan anggaran militer Tiongkok selama tahun 2013 hingga 2018. Alasan penulis mengangkat topik ini karena pada rentang tahun tersebut juga didapatkan bahwa kondisi perekonomian Tiongkok kurang begitu membaik. Hal tersebut tentunya akan menjadi topik bahasan menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Penulis akan menjabarkan beberapa hal mengenai profil negara, kondisi perekonomian, dan fenomena kenaikan anggaran militer dari Negara Tiongkok pada latar belakang di bab I.

### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi hal lazim ketika suatu negara mengalami pertumbuhan di berbagai bidang lalu mampu mendominasi di sekitar kawasannya hal tersebut tentu akan semakin memperbesar aset dan kedaulatannya terutama pada aspek ekonomi. Salah satu yang bisa dilakukan oleh negara dalam menjaga aset dan kedaulatannya adalah dengan memperkuat pertahanan dan militer. Sektor militer menjadi kunci utama karena sektor tersebut digunakan untuk menilai seberapa kuat dan dimana posisi negara tersebut pada dunia internasional.

Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan pertahanan dan militer sebuah negara yaitu modernisasi militer, memperkuat alutsista, dan meningkatkan anggaran militer. Dari ketiga langkah tersebut yang sangat berpengaruh

adalah anggaran militer suatu negara dikarenakan anggaran militer merupakan fondasi utama untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Sebanyak apapun pembuatan sebuah kebijakan pertahanan apabila tidak ada anggaran di dalamnya maka akan menjadi hambatan atau bahkan kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik.

Negara tidak semata-mata menaikkan anggaran militer begitu saja dikarenakan anggaran militer juga erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara. Oleh karena itu anggaran militer menjadi salah satu bagian yang vital dalam suatu negara dan harus dipertimbangkan secara matang. Disamping itu negara juga perlu mempertimbangkan tentang kondisi kemakmuran rakyatnya, dinamika pemerintahan, dan perlu atau tidaknya mengambil suatu pilihan kebijakan. Meski kekuatan militer tidak harus digunakan secara nyata, sektor ini dapat digunakan untuk memberikan ancaman, himbuan ataupun sebagai bentuk perimbangan kekuasaan terhadap lawan atau sering disebut dengan konsep keseimbangan kekuatan atau *Balance of Power*.

Salah satu negara yang memiliki perhatian lebih terhadap bidang pertahanan dan keamanan adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan selanjutnya akan disebut Tiongkok. Merupakan sebuah negara yang menduduki peringkat ketiga negara terluas didunia dengan luas area mencapai 9,596,960 km<sup>2</sup> (The World Factbook, 2018). Luas tersebut terbagi atas 9,326,410 km<sup>2</sup> merupakan dataran sementara 270,550 km<sup>2</sup> adalah wilayah perairan. Disamping itu negara dengan penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa tersebut sedang naik daun karena mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam bidang pertahanan keamanannya (Kent, 2011). Berdasarkan data statistik Tiongkok pada tahun 2016, komposisi penduduk jika dikategorikan menurut umur terdapat sebanyak 73 persen adalah usia 15-64 tahun, sementara untuk

usia 0-14 tahun sebesar 16,5 persen, dan sisanya 10,5 persen adalah usia di atas 65 lebih (China Statistical Yearbook, 2018). Data tersebut telah menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Tiongkok adalah warga dengan usia produktif, maka tidak mengherankan apabila perkembangan ekonomi Tiongkok juga berkembang pesat terutama di bidang perindustrian.

Tiongkok juga mulai diminati oleh dunia internasional dan investor asing yang berbondong-bondong ingin masuk ke pasar Tiongkok. Respon dari Presiden Xi Jinping juga positif yakni dengan ikut mendukung secara penuh dalam pembangunan di Tiongkok (Rizky, 2017). Hal ini dapat dilihat dari pelbagai kebijakan yang telah dibuat, seperti pengaktifan dan peningkatan jalur sutera baik jalur darat maupun laut, semakin banyaknya area kawasan industri dibangun dan melakukan perubahan pada sektor regulasi investasi agar semakin mudah investasi asing masuk ke Tiongkok. Presiden Xi Jinping juga menegaskan bahwa Tiongkok akan memperluas dan mengembangkan model perdagangan luar negerinya dan mengembangkan bentuk perdagangan baru untuk kedepannya. Selain itu Tiongkok juga mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan yang diinvestasikan oleh korporat asing di Tiongkok akan dijamin perlindungannya dan tidak akan memaksakan transfer teknologi saat sebuah korporat asing ingin berinvestasi ke Tiongkok (Agung Jatmiko, 2018).

Namun dibalik kesuksesannya tersebut Tiongkok tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya persaingan senjata antar negara, konflik antar wilayah pada daerah sekitar perbatasan, pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat dan kasus korupsi yang masih menjadi sorotan utama pemerintah Tiongkok sampai sekarang ini. Kemudian Presiden Xi Jinping juga telah menegaskan bahwa partai akan mulai melembagakan sistem pengawasannya terkait dengan kedisiplinan bagi komite PKC baik di tingkat kota maupun daerah guna memberantas korupsi (Rizky, 2017).

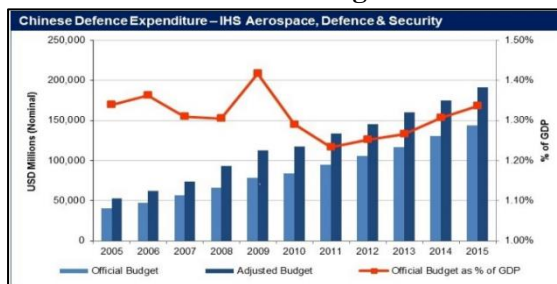
Permasalahan yang dihadapi Tiongkok tidak sampai disitu, terdapat beberapa konflik wilayah yang rawan terjadi di sekitar Taiwan, Provinsi Xinjiang dan Tibet. Kemudian untuk kawasan Asia Tenggara terutama di perairan Laut Cina Selatan juga sedang memanas dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama sengketa wilayah perbatasan antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN atas kepulauan di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Tidak hanya itu, perairan di kawasan Laut Cina Timur juga sedang meradang dikarenakan terdapat konflik sengketa Pulau Senkaku atau Diaoyu dalam bahasa Tiongkok dengan Jepang. Serangkaian peristiwa permasalahan tersebut telah menyumbang ketegangan dan rasa ketidaknyamanan bagi Tiongkok sendiri dan rakyat Tiongkok menaruh harapan besar kepada Xi Jinping ketika terpilih menjadi presiden Tiongkok pada tahun 2013. Mereka berharap Xi Jinping dapat membawa perubahan yang lebih signifikan dikarenakan pada masa pemerintahan sebelumnya seperti Hu Jintao dan Wen Jiabao, isu-isu seperti korupsi, kerusakan lingkungan serta kesenjangan sosial yang parah masih terjadi (Deutsche Welle, 2013).

Sementara itu dalam lingkup sektor ekonomi jika dilihat perkembangan GDP Tiongkok secara per kuartal didapatkan data bahwa pada kuartal pertama di tahun 2013 memberikan sinyal pertumbuhan perekonomiannya mulai melambat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat produk domestik bruto atau *Gross Domestic Bruto* (GDP) Tiongkok hanya tumbuh 7,7 persen pada kuartal pertama, kemudian kuartal kedua menurun menjadi 7,5 persen di tahun 2013 (DetikFinance, 2013). Keadaan tersebut sudah bisa dibilang terlihat melemah jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2012 GDP Tiongkok yang tercatat sebesar 7,9 persen (Andriyanto, 2013). Bahkan sampai tahun 2017 ekonomi Tiongkok masih tetap melemah jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2013 yaitu GDP berada di angka 6,9 persen (Diah, 2018). Memasuki tahun 2018 ini berdasarkan rangkuman data dari *Trading Economics* Tiongkok kembali

mengalami penurunan GDP, terhitung kuartal pertama sebesar 6,8 persen, kuartal kedua sebesar 6,7 persen dan pada kuartal ketiga menjadi 6,5 persen (Trading Economics, 2018).

Melambatnya perekonomian Tiongkok seperti pada data diatas juga menjadi tantangan berat yang harus dihadapi karena jika dilihat dari persentase GDP Tiongkok memang terus mengalami penurunan. Dari pelbagai hambatan, masalah dan ancaman yang membayangi Tiongkok, pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk terus berupaya meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya dengan cara membuat kebijakan meningkatkan anggaran militer yang terjadi pada rentang tahun 2013-2018.

**Grafik 1. 1 : Persentase peningkatan anggaran militer Tiongkok**

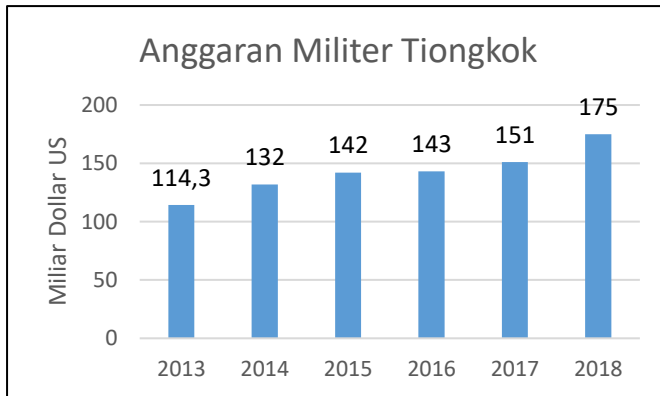


Sumber : Caffrey, C. (2015, Maret 5). *China's defence budget more than doubles since 2008*. Diambil kembali dari Jane's Defence: <https://www.janes.com/article/49742/china-s-defence-budget-more-than-doubles-since-2008>

Pada grafik 1.1 disajikan sebuah data berupa perubahan pertumbuhan anggaran militer Tiongkok berdasarkan GDP yang dapat dikatakan cenderung ke arah semakin meningkat (Caffrey, 2015). Kemudian peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2018 menyentuh angka 1,4

persen (Tweed, 2019). Selain itu pada bulan Maret setiap tahun Tiongkok akan mengumumkan seberapa besar anggaran militer yang akan dikeluarkan pada tahun tersebut.

**Grafik 1. 2 : Peningkatan anggaran militer Tiongkok tahun 2013-2018**



**Sumber** : Globalsecurity.org. (2018, Maret 24). *China's Defense Budget*. Diakses dari Globalsecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>

Berdasarkan data yang dilansir dari situs Global Security diketahui bahwa anggaran dana militer Tiongkok secara nominal pada tahun 2013 sebesar 114,3 miliar dolar AS, kemudian tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 132 miliar dolar AS, pada tahun 2015 menjadi 142 miliar dolar AS. Saat tahun 2016 sendiri kenaikan anggaran militer tidak begitu signifikan karena hanya meningkat sekitar 1 miliar dolar AS atau menjadi 143 miliar dolar AS. Tetapi saat memasuki tahun 2017 anggaran militer Tiongkok mulai meningkat dengan jarak yang terlihat jauh yaitu 151 miliar dolar AS dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 ini menjadi 175 miliar dolar AS (Globalsecurity.org, 2018).

Sedangkan data jumlah nominal anggaran militer yang diestimasi dan dipublikasikan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) yakni sebuah lembaga internasional yang berfokus untuk penelitian tentang militer maupun keamanan dari sebuah negara justru menunjukkan terjadinya peningkatan selama tahun 2013-2018. SIPRI mengestimasi bahwa anggaran militer Tiongkok pada tahun 2013 sebesar 176,8 miliar US dolar sedangkan pada tahun 2017 menjadi 228,1 miliar US dolar.

Kebijakan yang diambil pemerintah Tiongkok untuk terus menaikkan anggaran militer menjadi sorotan dan perhatian dunia internasional, terutama karena perilaku transparansi Tiongkok bisa dikatakan kurang begitu terbuka jika dibanding dengan negara lainnya. Hal ini tentunya menyebabkan timbulnya kecemasan tidak hanya di negara kawasan Asia Timur tetapi juga dunia internasional. Meskipun pada sisi yang lain yaitu pemerintah Tiongkok justru menganggap bahwa kebijakan dan langkah tersebut masih dalam batas wajar. Oleh karena itu, penulis berusaha menjelaskan alasan mengapa Tiongkok secara terus menerus menaikkan anggaran militernya selama 5 tahun terakhir yaitu pada rentang tahun 2013-2018 .

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Tiongkok meningkatkan anggaran militer pada masa pemerintahan Xi Jinping tahun 2013-2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Tiongkok meningkatkan anggaran militernya selama tahun 2013 - 2018.

## D. Kerangka Berpikir

Teori *Models of Military Expenditures* dan Teori *Rational Choice* sangat tepat untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Karena di dalam kedua teori tersebut terdapat konteks yang masih berkaitan dengan pandangan realisme. Pandangan realisme menjelaskan beberapa poin bahwa pada sistem internasional memiliki sifat anarki, sebuah negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional yang bersifat rasional, dan masalah utama bagi setiap negara adalah bagaimana menjalankan kelangsungan dan bertahan hidup (Goodin, 2010, p. 133). Realisme juga akan menjelaskan tentang sebuah prinsip *self-help* dimana nantinya akan dipaparkan lebih lanjut pada Teori *Rational Choice*. Kemudian pada Teori *Models of Military Expenditures* juga akan menjelaskan sebuah hipotesa dimana negara akan mengalami posisi *insecure* dan ingin tetap bertahan atau *survive*, hal tersebut tentunya juga merupakan bagian dari pandangan realisme.

### 1. Teori *Models of Military Expenditures*

Ron P. Smith mengemukakan sebuah teori bernama *Models of Military Expenditures* menjelaskan mengenai pengaruh pengeluaran ataupun peningkatan anggaran militer dimana sangat ditentukan oleh proses pembuatan kebijakan suatu negara dan relevansi militer yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara, kondisi domestik, kondisi kawasan dan kondisi internasional. Kebijakan untuk meningkatkan maupun mengurangi anggaran militer sebuah negara sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri (Smith, 1989). Tidak sampai disitu saja, peningkatan anggaran militer tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perlombaan serta persaingan senjata dan



faktor internal seperti perekonomian, birokrasi serta politik (Smith, 1989, hal. 346).

Kemudian dalam buku Jasen Castillo yang berjudul *Military Expenditures and Economic Growth* pada bagian *Alternative Hypotheses About The Growth Military Expenditures Relationship* menjelaskan bahwa terdapat tiga hipotesa mengenai motif sebuah negara meningkatkan anggaran militernya (Jasen Castillo, 2001, hal. 62). Castillo merangkum bahwa :

*“The ambition hypothesis argues that states experiencing rapid economic growth acquire greater international ambitions and thus increase their rates of military spending. The fear hypothesis argues that states increase their military expenditures when they face increased threats to their security. The legitimacy hypothesis argues that governments that believe their survival is threatened by domestic opposition use an aggressive foreign policy and higher levels of military spending to garner more support at home.”*

Bisa dilihat bahwa terdapat tiga hipotesa yang dijelaskan oleh Jasen Castillo yaitu *ambition*, *fear* dan *legitimacy*. Hipotesa *ambitions* dan *fear* akan cocok dalam menjelaskan fenomena peningkatan anggaran militer Tiongkok.

*Ambition* menjelaskan sebuah kebijakan pengeluaran anggaran militer baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan fungsi positif dari pertumbuhan ekonomi. Terdapat kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan anggaran militer dari suatu negara, sehingga bertambahnya

perekonomian negara dapat diartikan sebagai “kekuatan” yang dimiliki negara tersebut ikut bertambah dan ambisinya juga akan ikut meningkat.

Tiongkok mulai diminati dan dijadikan tujuan oleh investor asing untuk menanamkan sejumlah modal yang kemudian diikuti oleh respon Tiongkok sendiri telah membuka pintu lebar bagi para investor tersebut untuk masuk kedalam pasarnya. Pemerintah Tiongkok sangat mendukung akan fenomena tersebut, sebagai contoh bisa dilihat pada tahun 2018 ini Tiongkok telah menyetujui pembangunan beberapa perindustrian diantaranya pembangunan pabrik otomotif Tesla, pabrik LG Display Co. Ltd dan mengizinkan proyek BASF asal Jerman senilai 10 miliar US dolar (Nurdiana, 2018). Sebagai hasil dari terbukanya investasi asing dan pembangunan kawasan industri yang pesat, dapat dilihat bahwa sektor industri menyumbang besar terhadap GDP Tiongkok sebesar 47 persen dan jumlah dari GDP Tiongkok terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2013 sampai 2018 (Sawe, 2017). Jumlah dari seberapa besar GDP yang dimiliki Tiongkok bisa menjadi tolok ukur untuk mengetahui seberapa besar “kekuatan” keuangan yang dimiliki negara tersebut. Semakin tinggi angkanya, maka kemungkinan untuk membelanjakan juga semakin besar. Dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2013-2018 ini Tiongkok gencar dalam mengurus pertahanan dan militernya.

Kemudian *fear* menjelaskan terdapat suatu asumsi dimana negara akan meningkatkan anggaran militer untuk meningkatkan pertahanan dan keamanannya atas ketidakpastian dari perilaku negara lain yang dipandang dapat

mengancam negara itu sendiri. Perilaku meningkatkan anggaran militer dilakukan juga untuk bertahan (*survive*) dan mengatasi rasa ketidakamanan (*insecurity*) negara itu sendiri. Saat dua pesawat pembom B-52 Amerika Serikat yang sedang terbang di sekitar pulau sengketa area Laut Cina Selatan tanpa ada sebab atau alasan yang jelas, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyatakan bahwa Tiongkok tidak takut akan hal tersebut dan akan tetap membela keamanan serta kedaulatan negara, untuk melindungi stabilitas negara dan kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian langkah seperti pembangunan hanggar militer di Pulau Spratly pada kasus sengketa pulau di kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan bentuk pertahanan Tiongkok untuk menjaga atas apa yang dimilikinya (Amanda, 2016).

Castillo juga menjelaskan prinsip *self-help* dimana negara harus bisa mengukur dirinya sendiri dalam sektor tingkat keamanannya dikarenakan tidak adanya sebuah standar keamanan serta tidak ada pemerintahan di atas pemerintahan lagi. Oleh karena itu negara dengan hati-hati harus bisa “membaca” apa yang dilakukan negara lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh negara tersebut untuk menjaga kestabilan serta aset yang dimiliki adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan kekuatan militernya.

Tiongkok pada saat ini sedang naik daun dikarenakan semakin dikenalnya oleh dunia internasional akibat dari adanya fenomena seperti semakin banyak peminat investor asing yang ingin masuk ke pasar Tiongkok dan terdapat beberapa aset yang tumbuh dan sedang berusaha untuk menjaganya. Tidak sampai disitu, fenomena

tersebut juga diikuti dengan peningkatan kekuatan militer beserta anggaran belanjanya. Tentunya hal tersebut akan semakin meningkatkan eksistensi Tiongkok pada dunia internasional dan dengan semakin meningkatnya eksistensi dari negara itu sendiri akan semakin menambah rasa ketidaknyamanan (*insecure*) dan selalu ingin untuk menjaga seluruh aset yang telah dimilikinya serta posisi kedudukannya di dalam dunia internasional. Pemerintah terus meningkatkan anggaran belanja militer sebagai respon terhadap kondisi Tiongkok yang selalu menjadi pusat perhatian sekaligus sebagai langkah peningkatan kewaspadaan terhadap negara tetangga maupun pada dunia internasional.

## **2. Teori *Rational Choice***

Pada awalnya teori ini lahir dari seorang ahli ekonomi James Buchanan yang digunakan untuk menganalisis ekonomi secara makro, kemudian dalam ilmu sosial politik teori ini pertama kali diaplikasikan oleh Anthony Downs dalam sebuah karyanya pada tahun 1957 berjudul "*An Economic Theory of Democracy*". Teori ini menjelaskan mengenai pertimbangan pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas atau untung dan rugi (*benefit and cost calculation*) serta kepentingan tersendiri oleh seorang individu maupun kelompok atau umumnya disebut sebagai aktor.

Teori *rational choice* didasarkan pada premis bahwa para pembuat keputusan atau aktor dalam menentukan pilihan rasional akan menimbang-nimbang terlebih dahulu secara cermat atas keuntungan maksimal yang nantinya diperoleh, pertimbangan untung-rugi tersebut dilakukan supaya mendapat pilihan yang tepat, baik dan

berdaya guna (Hadiwinata, 2017, hal. 115-116). *Rational choice* tidak membahas tentang bagaimana proses pemilihan sebuah sikapnya, tetapi lebih fokus terhadap prediksi tentang bagaimana pola cara pemilihannya dan apa hasilnya (*outcome*). Keputusan akan pilihan tersebut didasarkan kepada prinsip kegunaan maksimum (*maximum utilization*), yaitu tentang analisis untung dan rugi yang akan meyakinkan seorang aktor dalam memilih bahwa keputusannya lebih berguna jika dibandingkan dengan pilihan yang lain.

Kemudian dalam upaya Tiongkok meningkatkan anggaran militer juga merupakan bagian dari pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri. Proses ini tentu tidak lepas dari dorongan aspek lingkungan eksternal atau internasional dan lingkungan domestik, seperti yang Graham T. Allison jelaskan bahwa: (Allison, 2015)

*“National security and national interest are the principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security and range of other objectives”*

Maka dalam perumusan sebuah kebijakan luar negeri membutuhkan pertimbangan yang tepat dalam rangka memenuhi pencapaian strategis sebuah negara. Upaya ini tentunya berasal dari asumsi bahwa kebijakan luar negeri sebagai sebuah tindakan pemaksimalan keuntungan atau kepentingan nasional suatu negara. Dalam sebuah proses pengambilan kebijakan, pemerintah akan dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan yang masing-masing kebijakan tersebut memiliki

sebuah konsekuensi yaitu untung dan rugi, dan negara nantinya akan memilih alternatif kebijakan yang paling memberikan keuntungan (*benefit*) dan meminimalkan kerugian (*cost*) dalam rangka mencapai kepentingan nasional.

Beberapa aspek penting terkait *rational choice* dikemukakan juga oleh Stephen M. Waltz. *Pertama*, teori *rational choice* bersifat individu yang merupakan hasil sosial dan politik yang dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu dan aktor kesatuan berupa negara. *Kedua*, Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, dengan mengambil suatu pilihan yang akan memberikan hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingan suatu negara. *Ketiga*, teori ini memfokuskan pada preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, contohnya aktor memiliki beberapa pilihan teori pilihan rasional dan menjadi alat untuk membuat suatu keputusan logis tentang bagaimana aktor (negara) membuat keputusan (Waltz, 1999).

Dalam kasus peningkatan anggaran militer oleh Tiongkok apabila merujuk pada konsep pilihan rasional maka alasan peningkatan tersebut sebagai upaya memaksimalkan pemenuhan kepentingan dan meminimalisir kerugian bagi Pemerintah Tiongkok terutama pada aspek pertahanan keamanan dan ekonomi. Jika Tiongkok meningkatkan anggaran militer maka respon atau dampak yang dihasilkan akan lebih banyak bersifat positif, hal ini didasarkan pada *benefit* atau keuntungan yang akan diperoleh Tiongkok, seperti *bargaining position* yang lebih

tinggi di dunia internasional dalam rangka menyebarkan pengaruh Tiongkok secara luas.

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan diatas, alasan peningkatan anggaran militer Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping tahun 2013-2018 disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Sebagai langkah peningkatan keamanan untuk menjaga stabilitas negara dan menjaga kestabilan pertumbuhan perekonomian Tiongkok.
2. Sebagai langkah Tiongkok untuk menunjukkan peningkatan kekuatan militernya dalam rangka memberikan pengaruh di kawasan maupun dunia internasional.

### **F. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti mengenai alasan peningkatan anggaran militer Tiongkok dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2018.

### **G. Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian pengumpulan data akan menggunakan *library research* dengan memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari buku, artikel, jurnal serta berita dan telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan, disusun, di analisa dan disimpulkan sesuai tujuan penelitian yang akan diteliti. Teknik analisis data yang akan digunakan akan merujuk kepada saran Miles & Huberman dimana tahapan analisisnya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Mathew B. Miles, 2007).